

ANALISIS LAPORAN REALISASI ANGGARAN DENGAN MENGGUNAKAN RASIO EFEKTIVITAS DAN RASIO EFISIENSI PADA KANTOR BADAN PERIJINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL KABUPATEN SERANG

Rukayah¹⁾, Nugrahini Kusumawati²⁾, Raden Irna Afriani³⁾

¹ Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

Email : Rukayahaya941@yahoo.com

² Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

nugrahini.kusumawati@binabangsa.ac.id

Email : ³ Jurusan Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bina Bangsa Banten

Email : irna.afriani22@gmail.com

ABSTRAK

One of the main pillars of a country's economy is the accountability of the stakeholders. In advanced societies of civilization, such accountability is insufficient with oral reports, but should be supported by written accountability reports. Presentation of financial statements is one of written accountability for the financial performance that has been achieved. The aim of this research is how to know financial performance of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang is analyzed from LRA 2014-2016 using effectivity ratio and efficiency ratio. The research method used is descriptive quantitative approach. The results of the research show that average effectiveness ratio from 2014-2016 102% is very effective. This is because the realization of local retribution revenue has increased from year to year. The ratio of efficiency of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang showed that the average efficiency ratio is 92%, its mean that less efficient. This is because operational expenditure and capital expenditure increase every year. Based on the result of research that financial performance of Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang.

Keywords : Effectivity Ratio, Efficiency Ratio

PENDAHULUAN

Mewujudkan *Good Governance* diperlukan perubahan paradigma pemerintahan yang mendasar dari sistem lama yang serba sentralistis, dimana pemerintah pusat sangat kuat dalam menentukan kebijakan. Paradigma baru tersebut menuntut suatu sistem yang mampu mengurangi ketergantungan dan bahkan menghilangkan ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, serta bisa memberdayakan daerah agar mampu berkompetisi baik secara regional, nasional maupun internasional. Menanggapi paradigma baru tersebut maka pemerintah memberikan otonomi kepada daerah seluas-luasnya yang bertujuan untuk memungkinkan daerah mengurus dan mengatur rumah tangganya sendiri agar berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Diberlakukannya UU No. 32 Tahun 2004 yang dikenal dengan sebutan otonomi daerah, kemudian untuk perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah dikeluarkan juga UU No. 33 Tahun 2004 dan tentunya kedua UU ini erat kaitannya karena secara otomatis dengan adanya peralihan wewenang pemerintah dari pusat ke daerah maka harus diikuti dengan penyerahan keuangan yang dipercayakan pemerintah pusat untuk bisa mengolah keuangan dari masing-masing daerah. Memang kehadiran UU No. 33 Tahun 2004 telah membawa dampak yang besar dan cukup mendasar dalam hubungan keuangan pusat dan daerah. Dalam UU ini menyatakan antara lain bahwa untuk mendukung penyelenggaraan otonomi daerah melalui penyediaan sumber-sumber pembiayaan berdasarkan desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, perlu diatur perimbangan keuangan antara pemerintah

pusat dan daerah berupa sistem keuangan yang diatur berdasarkan pembagian kewenangan, tugas, dan tanggung jawab yang jelas antar tingkat pemerintahan. Permendagri No. 56 Tahun 2007 mendefinisikan bahwa keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka anggaran pendapatan dan belanja daerah.

Organisasi sektor publik saat ini tengah menghadapi tekanan untuk efisien dalam memperhitungkan biaya ekonomi dan biaya sosial, serta dampak negatif atas aktivitas yang dilakukan. Setiap organisasi pemerintahan pasti menginginkan tujuannya tercapai secara efektif dan efisien dalam merealisasikan anggaran pendapatan dan belanja daerahnya (APBD), terlebih lagi dalam situasi globalisasi seperti masa sekarang ini, untuk itu pemerintah harus menyusun laporan realisasi anggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi anggaran dalam suatu periode tertentu. Laporan Realisasi Anggaran bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan atau instansi, dimana fungsinya untuk mengetahui keadaan keuangan suatu perusahaan atau instansi. Laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah yang telah ditetapkan melalui PERDA setelah sebelumnya diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) paling lambat 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir, laporan realisasi ini merupakan salah satu alat ukur untuk melihat implementasi dari kebijakan pelaksanaan pengelolaan keuangan suatu daerah dalam upaya mewujudkan pelayanan publik yang optimal serta upaya dalam mendorong pembangunan ekonomi daerah.

KAJIAN LITERATUR

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam buku Abdul Halim : dapat didefinisikan sebagai rencana operasional keuangan pemerintah daerah, dimana pada satu pihak menggambarkan perkiraan pengeluaran setinggi-tingginya guna membiayai kegiatan-kegiatan dan proyek-proyek daerah selama satu tahun anggaran tertentu, dan dipihak lain menggambarkan perkiraan dan sumber-sumber penerimaan daerah guna menutupi pengeluaran-pengeluaran yang dimaksud”.

Menurut Wajong (1962) dalam Halim 2008 APBD didefinisikan sebagai rencana pekerjaan keuangan yang dibuat untuk suatu jangka tertentu ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit kepada badan eksekutif (kepala daerah) untuk melakukan pembiayaan guna kebutuhan rumah tangga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar penetapan anggaran, dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah dituntut untuk dapat menyajikan Laporan Keuangan yang meliputi : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan Keuangan, Laporan Realisasi Anggaran. Laporan Realisasi Anggaran Menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam 1 periode pelaporan. Unsur yang tercakup dalam laporan realisasi anggaran terdiri dari pendapatan, belanja, transfer dan pembiayaan. Terhadap unsur-unsur tersebut masing-masing didefinisikan sebagai berikut :

1. Pendapatan (basis kas) adalah penerimaan oleh bendahara umum daerah yang menambahkan ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Belanja (basis kas) adalah semua pengeluaran bendahara umum daerah yang mengurair ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperbolehkan pembayarannya kembali. Belanja (basis akrual) adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (financing) adalah setiap penerimaan yang harus dibayar kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan, maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain dan penyertaan modal pemerintah daerah.

a) Neraca Daerah

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai asset, kewajiban dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Neraca sekurang-kurangnya mencantumkan pos-pos berikut ini:

1. Kas dan setara kas
2. Investasi jangka pendek
3. Piutang pajak dan bukan pajak
4. Persediaan
5. Investasi jangka panjang
6. Aset tetap
7. Kewajiban jangka pendek
8. Kewajiban jangka panjang
9. Ekuitas dana

b) Laporan arus kas/Aliran kas

Laporan arus kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran dan saldo akhir kas pemerintah daerah selama periode tertentu. Unsur yang tercakup dalam laporan arus kas terdiri dari penerimaan dan pengeluaran kas, yang masing-masing didefinisikan sebagai berikut:

1. Penerimaan kas adalah semua aliran kas terdiri dari penerimaan yang masuk ke bendahara umum daerah
2. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari bendahara umum daerah.

c) Catatan Atas Laporan Keuangan

Catatan atas laporan keuangan berisi penjelasan naratif atau rincian dari angka-angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memuat informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk mengungkapkan didalam standar akuntansi pemerintahan serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar.

Adapun hal-hal yang diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target APBD berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
2. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama satu tahun pelaporan
3. Menyajikan informasi tentang dasarpenyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
4. Mengungkapkan informasi yang diharuskan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang belum disajikan pada lembar muka laporan keuangan
5. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan, belanja dan rekonsiliasinya dengan basis kas
6. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian secara wajar, yang tidak disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

Analisis Laporan Realisasi Anggaran

Analisis adalah penyelidikan mendalam tentang sesuatu dengan memaparkan data atau fakta yang ada untuk kemudian dicari keterkaitan antara data-data tersebut. Laporan realisasi anggaran (LRA) Menurut Nur Afiah menyebutkan bahwa “laporan realisasi anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan pemakaian sumber dana ekonomi yang dikelola oleh pemerintah (pusat atau daerah) yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan”. Secara sederhana laporan realisasi anggaran merupakan salah satu komponen dalam laporan keuangan pemerintah yang menyajikan informasi tentang realisasi dan anggaran entitas pelaporan secara tersanding untuk periode tertentu” Analisis laporan realisasi anggaran adalah mengkaji secara mendalam tentang laporan realisasi anggaran yang telah disusun oleh pihak yang bertanggung jawab dalam penyusunan laporan realisasi anggaran tersebut. Mahsun (2013:145) menyatakan bahwa anggaran adalah perencanaan keuangan untuk masa depan yang pada umumnya mencakup jangka waktu satu tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Anggaran merupakan perencanaan jangka pendek organisasi yang menerjemahkan beberapa program ke dalam rencana keuangan tahunan yang lebih kongkret. Anggaran merupakan alat ekonomi terpenting yang dimiliki pemerintah untuk mengarahkan perkembangan sosial dan ekonomi, menjamin kesinambungan, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Tujuan pelaporan realisasi anggaran menurut PSAP Nomor 02 adalah memberikan informasi realisasi dan anggaran entitas pelaporan. Perbandingan antara anggaran dan realisasinya menunjukkan tingkat ketercapaian target-target yang telah disepakati antara legislatif dan eksekutif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Manfaat informasi realisasi anggaran yaitu menyediakan informasi mengenai realisasi pendapatan, realisasi belanja, realisasi transfer, surplus/defisit dan realisasi pembiayaan dari satu entitas pelaporan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya. Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi.
- b. Menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran.

Analisis Menilai Kinerja Keuangan Daerah

Halim berpendapat bahwa untuk mengukur kinerja keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien, akuntabilitas, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan dan hasil dari rasio tersebut dapat digunakan :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah
2. Mengukur efisiensi dan efektivitas dalam merealisasikan pendapatan daerah
3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintah daerah dalam membelanjakan pendapatan daerahnya
4. Melihat pertumbuhan atau perkembangan perolehan pendapatan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini mengacu teori dalam Sekaran, yaitu metode deskriptif kuantitatif (Sekaran U, 2002). Penelitian ini merupakan penelitian yang bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok (Syamsudin & Damiyanti: 2011). Penelitian ini menilai sifat dari kondisi-kondisi yang tampak. Tujuan dalam penelitian ini dibatasi untuk menggambarkan karakteristik sesuatu sebagaimana adanya. Dalam menganalisa data yang terkumpul penulis menggunakan rasio keuangan yaitu rasio Efektivitas dan rasio Efisiensi. Dimana Rasio Efektivitas dapat diukur dengan : (SuyanaUtama, 2008:33)

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Tabel 1. Kriteria Efektivitas Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Sangat Efektif
100	Efektif
90 – 99	Cukup Efektif
75 – 89	Kurang Efektif
Di bawah 75	Tidak Efektif

Berdasarkan analisis rasio Efektivitas yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka pendapatan dikatakan sangat efektif
2. Jika hasil pencapaian 100%, maka pendapatan dikatakan efektif
3. Jika hasil pencapaian antara 90%-99%, maka pendapatan dikatakan cukup efektif
4. Jika hasil pencapaian 75%-89%, maka pendapatan dikatakan kurang efektif
5. Jika hasil pencapaian dibawah 75%, maka pendapatan dikatakan tidak efektif.

Rasio Efisiensi

Tingkat efisiensi diukur dengan cara membandingkan realisasi anggaran belanja dengan total anggaran belanja (Mahsun : 2013).

$$\text{Rasio Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Anggaran Belanja}} \times 100\%$$

Tabel 2. Kriteria Efisiensi Kinerja Keuangan

Persentase Kinerja Keuangan (%)	Kriteria
Di atas 100	Tidak Efisien
90 –100	Kurang Efisien
80–90	Cukup Efisien
60 – 80	Efisien
Di bawah 60	Sangat Efisien

Berdasarkan analisis rasio Efisiensi yang diuraikan diatas maka dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Jika hasil perbandingan lebih dari 100%, maka anggaran belanja dikatakan tidak efisien
2. Jika hasil pencapaian antara 90%-100%, maka anggaran belanja dikatakan kurang efisien
3. Jika hasil pencapaian antara 80%-90%, maka anggaran belanja dikatakan cukup efisien
4. Jika hasil pencapaian antara 60%-80%, maka anggaran belanja dikatakan efisien
5. Jika hasil pencapaian dibawah 60%, maka anggaran belanja dikatakan sangat efisien.

HASIL DAN DISKUSI

Rasio Efektivitas

Dari perhitungan rasio Efektivitas, diperoleh rasio efektivitas Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 :

Tabel 3. Rasio Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 -2016

Tahun	Realisasi Pendapatan	Anggaran Pendapatan	Rasio Efektivitas	Kriteria
2014	Rp. 15.031.931.412,00	Rp. 14.511.158.692,00	103%	Sangat Efektif
2015	Rp.20.393.524.779,00	Rp.19.800.000.000,00	103%	Sangat Efektif
2016	Rp. 20.530.823.763,00	Rp. 20.000.000.000,00	102%	Sangat Efektif
Jumlah rata-rata			102%	Sangat Efektif

Sumber data : BPTPM Kabupaten Serang, 2014-2016 (Data Diolah)

Hasil dari rasio efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014, Anggaran Pendapatan Daerah sebesar Rp. 14.511.158.692 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 15.031.931.412. Selisih antara anggaran dan realisasi sebesar Rp. 520.772.720, dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 103% dikategorikan sangat efektif karena melebihi 100%. Hal ini dikarenakan realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 103,59%. Pada tahun 2014 jumlah perusahaan yang terdaftar memiliki izin mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan.

Pada tahun 2015 Anggaran Pendapatan sebesar Rp.19.800.000.000 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 20.393.524.779. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp. 593.524.779. Dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 103%. Dapat dikategorikan sangat efektif karena rasio efektivitas melebihi 100%. Realisasi penerimaan retribusi daerah mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya sebesar 103%, hal ini dikarenakan Pendapatan Retribusi Daerah diantaranya Retribusi izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi izin Gangguan/Keramaian bahwa pada tahun 2014 Pendapatannya lebih kecil dari pada tahun 2015, pada tahun 2014 jumlah Perusahaan yang terdaftar memiliki izin lebih sedikit dibandingkan Pada tahun 2015 mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan dan terdapat penambahan Pendapatan Retribusi izin Usaha Pendirian Keramba Apung.

Pada tahun 2016 Anggaran Pendapatan sebesar Rp. 20.000.000.000 dan Realisasi Pendapatan sebesar Rp. 20.530.823.763. Selisih anggaran dan realisasi anggaran sebesar Rp. 530.823.763. dengan demikian diperoleh rasio efektivitas sebesar 102%. Dapat dianalisa bahwa Pendapatan Retribusi Daerah diantaranya Retribusi izin mendirikan bangunan dan Retribusi izin gangguan/keramaian bahwa pada tahun 2015 pendapatannya lebih kecil dari tahun 2016 dikarenakan pada tahun 2015 jumlah perusahaan yang terdaftar memiliki izin lebih sedikit. Pada tahun 2016 mengalami peningkatan sehingga melebihi target yang telah ditentukan pada pagu anggaran. Pemerintah Daerah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dianggap berhasil dalam meningkatkan Pendapatan Daerah sehingga melebihi target anggaran yang ditetapkan.

a. Rasio Efisiensi

Dari perhitungan rasio Efisiensi, diperoleh rasio efisiensi Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun Anggaran 2016 :

Tabel 4. Rasio Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 -2016

Tahun	Uraian	Anggaran Belanja	Realisasi Belanja		Kriteria
			Rp	%	
	Belanja	Rp. 8.179.081.600,00	Rp. 7.509.036.703,00	91%	Kurang Efisien
2014	1. Belanja Operasional	Rp. 7.058.471.600,00	Rp. 6.440.641.253,00	91%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	Rp. 1.120.610.000,00	Rp. 1.068.395.450,00	95%	Kurang Efisien
	Belanja	Rp. 8.218.397.897,00	Rp. 7.858.371.790,00	95%	Kurang Efisien
2015	1. Belanja Operasional	Rp. 7.586.037.897,00	Rp. 7.246.345.890,00	95%	Kurang Efisien
	2. Belanja Modal	Rp. 632.360.000,00	Rp. 612.025.900,00	96%	Kurang Efisien
	Belanja	Rp. 8.090.176.405,00	Rp. 6.884.408.724,00	85%	Cukup Efisien
2016	1. Belanja Operasional	Rp. 7.213.693.405,00	Rp. 6.007.953.624,00	83%	Cukup Efisien
	2. Belanja Modal	Rp. 876.483.000,00	Rp. 876.455.100,00	100%	Kurang Efisien
Jumlah rata-rata				92%	Kurang Efisien

Sumber data : BPTPM Kabupaten Serang, 2014-2016 (Data Diolah)

Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun 2014, Anggaran Belanja sebesar Rp.8.179.081.600 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 7.509.036.703. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 670.044.897, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang diajukan oleh BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhannya dan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesuai dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) saja. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 7.058.471.600 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 6.440.641.253. Selisih anggaran belanja operasional dengan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 617.830.347, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 91% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 1.120.610.000 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.068.395.450. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 52.214.550, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 92% dikategorikan kurang Efisien karena melebihi 90%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 dianggap Kurang Berhasil dalam membelanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2015 Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.218.397.897 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 7.858.371.790. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp. 360.026.107, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang diajukan oleh BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhannya dan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesuai dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) saja. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 7.586.037.897 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 7.246.345.890. Selisih anggaran belanja operasional dengan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 339.692.007, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 95% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan disetiap tahunnya. Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 632.360.000 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 612.025.900. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 20.334.100, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 96% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 95% dikategorikan kurang Efisien karena melebihi 90%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2015 dianggap Kurang Berhasil dalam membelanjakan anggarannya sehingga hampir mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pada Tahun 2016 Anggaran Belanja sebesar Rp. 8.090.176.405 dan Realisasi Belanja sebesar Rp. 6.884.408.724. Selisih anggaran belanja dengan realisasi belanja sebesar Rp.

530.823.763. dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 85% dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Hal ini dikarenakan Anggaran yang diajukan oleh BPTPM kepada Pemerintah Daerah guna membelanjakan kebutuhannya cenderung tidak terealisasi sehingga anggaran yang diberikan oleh Pemerintah Daerah tidak cukup untuk membelanjakan kebutuhannya dan pemerintah daerah hanya memberikan anggaran sesuai dengan SAB (Standar Anggaran Belanja) saja. Kemudian hasil Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Operasional sebesar Rp. 7.213.693.405 dan Realisasi Belanja Operasional sebesar Rp. 6.007.953.624. Selisih anggaran belanja operasional dengan realisasi belanja operasional sebesar Rp. 1.205.739.781, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 83% dikategorikan cukup efisien karena melebihi 80%. Hal ini dikarenakan belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya.

Selanjutnya Hasil Perhitungan Rasio Efisiensi Anggaran Belanja Modal sebesar Rp. 876.483.000 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp.876.455.100. Selisih anggaran belanja modal dengan realisasi belanja modal sebesar Rp. 27.900, dengan demikian diperoleh rasio efisiensi sebesar 100% dikategorikan kurang efisien karena melebihi 90%. Hal ini dikarenakan belanja modal mengalami kenaikan harga disetiap tahunnya. Maka hasil dari perhitungan jumlah rata-rata rasio efisiensinya sebesar 89% dikategorikan Cukup Efisien karena melebihi 80%. Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2016 dianggap Cukup Berhasil dalam membelanjakan anggarannya karena belum mencapai target anggaran yang ditetapkan.

Pembahasan

Tabel 4 dapat kita lihat Rasio Efisiensi Belanja Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Pada tahun 2014 persentase Belanja Operasional sebesar 91% sedangkan persentase Belanja Modalnya sebesar 95%. Pada tahun 2014 mengalami kenaikan belanja operasi dan belanja modal. Belanja tersebut dapat dianalisa bahwa pada tahun 2013 belanja operasi dan belanja modalnya menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pegawai, serta kebutuhan kantor. Sedangkan Pada tahun 2014 belanja pegawai dan belanja barang dan jasa mengalami kenaikan, Terkecuali pada belanja modal belanja gedung dan bangunan yang hanya merupakan kelanjutan pada tahun 2013.

Pada tahun 2015 persentase Belanja Operasional sebesar 95% sedangkan Belanja Modal sebesar 96%. Belanja Operasi dan Belanja Modal di tahun 2015 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan pada Belanja Operasional belanja untuk pegawai mengalami kenaikan sedangkan belanja barang dan jasa mengalami penurunan dari tahun sebelumnya. Belanja Modal mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, di tahun 2015 belanja gedung dan bangunan mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, adanya belanja jalan, irigasi dan jaringan di tahun 2015, sedangkan belanja aset tetap lainnya hanya ada di tahun 2014.

Pada tahun 2016 persentase Belanja Operasional sebesar 83% sedangkan Belanja Modal sebesar 100%. Belanja Operasi mengalami penurunan dari tahun sebelumnya sedangkan Belanja Modal mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan Belanja Operasional dan Belanja Modal menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan pegawai serta kebutuhan kantor. Pada tahun 2016 mengalami penurunan belanja operasi karena perencanaan kegiatan kurang memahami dan pada belanja modal mengalami kenaikan karena menyesuaikan kebutuhan fisik.

Kinerja Keuangan Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dari tahun ketahun mengalami peningkatan. Namun belum mengalami peningkatan yang

signifikan. Hal ini perlu diperbaiki lagi dalam pengelolaan Belanja Operasi dan Belanja Modalnya. Perlu untuk diperhatikan oleh Pemerintah Daerah walaupun patokan untuk besarnya Belanja Operasional dan Belanja Modal terhadap APBD belum ada, namun sebagai daerah yang berada di Negara Berkembang Pemerintah Daerah seharusnya meningkatkan Belanja Modal (pembangunan) dalam menyediakan sarana prasarana yang mendukung untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelayanan publik.

KESIMPULAN

Efektivitas Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016 dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efektivitasnya diperoleh sebesar 102% termasuk dalam Kriteria Sangat Efektif. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dikatakan berhasil Merealisasikan Pendapatan dengan Anggaran Pendapatannya. Efisiensi Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang Tahun Anggaran 2014 sampai dengan Tahun 2016. Dilihat dari perhitungan rata-rata Rasio Efisiensinya diperoleh sebesar 92% termasuk dalam Kriteria Kurang Efisien. Hal ini berarti Pemerintah Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Serang dapat dikatakan Kurang berhasil dalam Merealisasikan Belanja dengan Anggaran Belanjanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim, 2007, *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi 3* (Jakarta: Salemba Empat)
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, 2014, *Teori, Konsep, dan Aplikasi Akuntansi Sektor Publik* (Jakarta: Salemba Empat)
- Amirullah Haris Budiyo, 2004, *Pengantar Manajemen* (Yogyakarta: Graha Ilmu)
- Deddi Nordiawan, Ayuningtyas Hertianti, 2010, *Akuntansi Sektor Publik Edisi 2* (Jakarta: Salemba Empat)
- Mardiasmo, 2009, *Akuntansi Sektor Publik* (Yogyakarta: Andi)
- Nur Afiah, 2010, *Implementasi Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah*
- Sawir, Agnes, 2003, *Analisa Kinerja Keuangan dan Perencanaan Keuangan Perusahaan* (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama)
- Sedarmayanti, 2009, *Sumberdaya Manusia dan Produktivitas Kerja*
- Sholeh, Chabib, Suripto, 2011, *Menilai Kinerja Pemerintah Daerah* (Bandung: Fokus Media)
- SP. Hasibuan, 1984, *Manajemen Sumberdaya Manusia Edisi Revisi*
- Sugiyono, 2012, *Metode Penelitian Pendidikan. Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta)
- Suyana Utama, 2008, *Rasio Efektivitas dan Efisiensi*
- Anastasia F. Palilingan, H. Sabijono, L. Mawikere, 2015, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Pada Dinas Pendapatan Kota Manado*
- A.N.J. Dien, J. Tinangon., S. Walandouw, 2015, *Analisis Laporan Realisasi Anggaran Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kota Bitung*
- Gusti Ayu Yuni Antari, 2016, *Analisis Laporan Keuangan Sebagai Dasar Dalam Menilai Kinerja Keuangan Pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bangli*
- Joko Pramono, 2014, *Analisis Rasio Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Surakarta)*

- Mira Mustika, 2016, *Analisis Laporan Realisasi APBD Untuk Mengukur Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun 2010-2014*
- R.Y. Budiman., H. Wokas, 2015, *Analisis Kinerja Belanja Dalam Laporan Realisasi Anggaran Pada Tiga Daerah Pemekaran di Provinsi Sulawesi Utara*
- Pemendagri, Tahun 2007, No. 56, *Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah*
- UU No. 32, Tahun 2004, *Otonomi Daerah*
- UU No. 33, Tahun 2004, *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah*